

PENGARUSUTAMAAN MODERASI ISLAM MELALUI PELIBATAN PESANTREN DALAM MEDAN KEBUDAYAAN DIGITAL

Fahmy Farid Purnama

Institut Agama Islam Darussalam (IAID), Ciamis-Jawa Barat

e-mail: fahmyfarid99@iaid.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berusaha menganalisis realitas pesantren—dengan segala modal kultural, sosial, hingga intelektual, dalam konteks lanskap kebudayaan digital. Dilandaskan pada analisis konten secara deskriptif dan kritis berbasis penelitian interpretif-kualitatif, penelitian ini terlebih dahulu memaknai moderatisme dalam konstruksi etis, bukan ideologis, kemudian melakukan pemetaan pesantren dalam lanskap kebudayaan kontemporer, serta secara kritis mengelaborasi konsekuensi-konsekuensi logis dari perkembangan kultur digital, baik peluang maupun tantangannya, juga dampak praksis upaya pelibatan pesantren dalam medan-medan kontestasi digital. Dengan menyelidiki bagaimana realitas teknologis memengaruhi pola pikir dan kebudayaan masyarakat, penelitian berusaha memberikan landasan strategis bagi upaya-upaya pengarusutamaan Islam ramah melalui pelibatan pesantren dalam medan kebudayaan digital, kemudian menegaskan wajah Islam marah yang selama ini cukup marak berkontestasi di media sosial.

Abstract

This study attempts to analyze the reality of Islamic boarding schools—with all their cultural, social, and intellectual capital, in the context of the digital cultural. Based on descriptive and critical content analysis based on interpretive-qualitative research, this research first defines moderatism in ethical, not ideological construction, then maps Islamic boarding schools in the contemporary cultural landscape, and critically elaborates on the logical consequences of the development of digital culture, both opportunities and challenges, as well as the practical impact of efforts to involve Islamic boarding schools in digital contestation fields. By investigating how technological realities affect people's mindsets and culture, the study seeks to provide a strategic basis for efforts to mainstream friendly Islam through the involvement of Islamic boarding schools in the field of digital culture, then negate the angry face of Islam that has been quite rife with contesting on social media.

Kata Kunci: Sunnah, modernitas, otoritas kenabian.

Pendahuluan

Ketika banyak negara mulai riuh memperbincangkan upaya menciptakan kondisi ideal masyarakat berbasis kecerdasan artifisial yang terintegrasi dengan teknologi informasi, masyarakat muslim Indonesia malah cenderung terjebak dalam polemik-polemik *non*-substansial yang dikontestasikan melalui medan-medan digital dan manipulasi teknologi informasi. Tidak jarang wacana keagamaan di ruang digital dihadirkan dalam bentuk kontestasi yang bias, baik bias politik identitas, ekonomi-politik, hingga hingga ideologi. Situasi tersebut berdampak pada

maraknya patologi-patologi sosial dan pelbagai parodi subjektivitas semu yang muncul dalam potret narsisme religius. Klaim-klaim egologis-sektarian liar bertebaran tanpa kontrol, bahkan *nir*-paradigma keilmuan dan basis refleksi yang bisa dipertanggungjawabkan. Alih-alih menghadirkan Islam ramah, komodifikasi identitas muslim sering kali malah tampil dalam bentuk ujaran kebencian, *hoax*, hingga *cyber-bullying*; semacam proyeksi religiositas Islam marah.

Dalam konteks ketika wacana keagamaan sering kali dimaknai tidak lebih sebatas komoditas digital yang dipertontonkan secara vulgar dan artifisial, segala macam hal yang tumbuh dan berkembang dari aras tradisi pesantren, beserta segala ideal-moral berbasiskan moderasi pola pikir dan gerakan, serta berlandaskan nilai-nilai *rahmat li al-'ālamīn*, mulai dipertaruhkan dihadapan semangat zaman (*Zeitgeist*) yang bergerak sedemikian cepat. Mengapa pesantren menjadi sedemikian sentral dalam mengawal semangat zaman masyarakat muslim di Indonesia yang bergerak dinamis?

Merupakan fakta tak terbantahkan, bahwa pesantren—dengan segala cipta, karya, karsa, wacana, dan dinamikanya—menjadi jangkar bagi perkembangan Islam di Nusantara. Pesantren telah memberikan corak khas dalam berbagai segmen religiositas masyarakat Indonesia sejak masa pra-kemerdekaan hingga kini, baik dalam peranannya sebagai perawat kelestarian nilai ideal-moral keagamaan, lembaga pendidikan kultural, maupun pelopor transformasi sosial-kemasyarakatan. Maka, sebagai lembaga pendidikan keagamaan tertua di Nusantara yang berakar dari gerakan kolektif-kultural masyarakat, pesantren turut serta dalam setiap babakan episodik sejarah bangsa Indonesia; mulai dari masa pra-kolonial, kolonial, bahkan hingga era digital. Dalam rentang sejarah panjang itulah, pesantren memainkan perannya sebagai elemen bangsa yang senantiasa turut terlibat dalam upaya-upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, dengan berbasiskan pada prinsip-prinsip ideal-moral agama sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

Terlepas dari kemampuan untuk senantiasa mengadaptasi semangat aktual zamannya, tidak bisa dipungkiri bahwa realitas pesantren saat ini dihadapkan pada tantangan—dalam bebrbagai penelitian sosial diistilahkan—era revolusi 4.0; semacam lanskap kebudayaan masyarakat berbasis *Big Data* yang telah mendorong semakin masifnya kultur digital (*cyber culture*). Segala sesuatu dilandaskan pada prinsip-prinsip konektivitas (*Internet of Things/IoT*), kemudian menghasilkan perkembangan revolusioner di bidang kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), otomatisasi berbasis kecerdasan robotik, rekayasa genetik, hingga simbiosis organisme dan mesin dalam bentuk *cyborg* dan makhluk “pasca-manusia”. Lebih jauh, tidak berhenti pada era 4.0, beberapa penelitian sudah mulai memprediksi akan terjadinya gelombang revolusioner generasi ke-5; semacam perubahan kultur masyarakat yang diistilahkan sebagai era *people-centric super-smart society* 5.0 untuk mengembalikan kedaulatan dan daya refleksi manusia di hadapan mesin.¹

¹ Dalam banyak penelitian sosial, disebutkan bahwa perkembangan manusia hingga saat ini terpetakan ke dalam 5 tahapan revolusioner, yaitu revolusi 1.0 (*hunter-gatherer society*), revolusi 2.0 (*agrarian society*), revolusi 3.0 (*industrial society*), revolusi 4.0 (*information society*), dan revolusi 5.0

Tentu, sebelum membicarakan pesantren dalam konteks *people-centric super-smart society* 5.0 yang belum lama ini mulai gencar diwacanakan di negara-negara maju—bahkan mulai diaplikasikan dalam kesehariannya, tidak sedikit pesantren yang masih belum tuntas dihadapan persoalan *Internet of Things* dan *Big Data Society*. Mulai dari problem infrastruktur digital, aksestabilitas, ekonomi-politik, hingga problem legal-moral yang sedikit-banyak turut serta memperlambat, bahkan tidak jarang menghambat, upaya mengadaptasikan kultur pesantren ke dalam kultur masyarakat berbasis informasi (*information society*). Padahal, jika mengacu pada aras kebudayaan kontemporer, pesantren sendiri tengah dihadapkan pada tantangan kultur digital.

Mengacu pada narasi di atas, penelitian ini dilakukan untuk mencermati secara kritis bagaimana pemberdayaan pesantren—dengan segala modal kultural, sosial, hingga intelektual, dihadapan tantangan kultur digital. Berbasiskan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif-analitis, penelitian ini akan terlebih dahulu melakukan pemetaan pesantren dalam lanskap kebudayaan kontemporer, kemudian secara kritis mengelaborasi konsekuensi-konsekuensi logis dari kultur digital, baik peluang maupun tantangannya, serta dampak praksis upaya pelibatan santri/mahasiswa dalam medan-medan kontestasi digital, khususnya dalam konteks upaya pengarusutamaan moderasi Islam melalui pelibatan pesantren dalam medan kebudayaan digital.

Menakar Pola Pikir Moderat

Di antara akar dari paradigma moderatisme Islam merujuk pada bagaimana menghadirkan Islam sebagai *rahmat li al-‘ālamīn*, (kasih sayang bagi semesta). Dalam memaknai kasih sayang tersebut, Ayat Al-Qur’an dalam Q.S. Al-Anbiya [21]:107 penting dicermati:

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Diuraikan Ar-Razi dalam Kitab *Tafsīr Al-Kabīr*,² bahwa Muhammad Saw. merepresentasikan sosok kenabian yang melandaskan dakwahnya pada prinsip-prinsip kasih sayang terhadap alam semesta, bukan perang. Sementara peperangan yang terjadi pada masa dakwah kenabian lebih didorong oleh faktor-faktor eksternal, seperti peperangan terhadap kesombongan yang meraibkan daya refleksi dan upaya menemukan nilai kebenaran dari orang-orang Arab *Jāhiliyyah*. Hal ini semakin menegaskan bahwa peperangan dalam konteks kenabian tidak berkarakter offensif—sebagaimana yang terjadi dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme, melainkan defensif. Prinsip kasih sayang tersebut semakin ditegaskan oleh pernyataan Nabi Saw. sendiri, sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah, yang mengatakan bahwa:

(*human-centered super-smart society*). Selengkapnya lihat: Hitachi-UTokyo Laboratory, *Society 5.0* (Tokyo: Springer, 2018).

² Fakhruddin Al-Razi, *Tafsīr al-Kabīr: Mafātiḥ al-Ghaib* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), vol. 22.

Suatu hari Rasulullah Saw. diminta agar mendoakan kehancuran orang-orang musyrik. Nabi Saw. menjawab: “*Sesungguhnya aku diutus sebagai rahmat, bukan azab*”.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan Hudzaifah, Nabi Saw. berkata:

Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia yang suka marah sebagaimana manusia lainnya. Maka siapa saja yang membuatku marah dan melaknatnya, semoga (balasan) kepada mereka ditangguhkan hingga Hari Kiamat”

Sebagai agama yang berparadigmakan *rahmat li al-‘ālamīn*, Islam—sebagaimana terproyeksikan pada sosok kenabian Muhammad Saw. yang diutus dengan membawa pesan damai, sebagaimana terilustrasikan melalui penafsiran Al-Qur’an di atas—tentu menuntut kesalehan paling paripurna dalam religiositas seorang muslim, baik kesalehan individual, sosial, maupun estetikal. Namun demikian, tidak lantas prinsip tersebut dimaknai secara apologetik, bahkan cenderung terkesan seperti pembiaran terhadap pelbagai kerusakan yang dilakukan oleh manusia, khususnya dalam konteks berbangsa dan bernegara, bahkan dijadikan legitimasi atas pembiaran tersebut. Pada titik inilah, moderatisme Islam yang dilandaskan pada prinsip *rahmat li al-‘ālamīn* harus dimaknai secara holistik.

Melalui tafsiran Al-Qur’an di atas, hal pertama yang perlu dicermati bahwa; alih-alih sebagai sebuah konstruksi praktis yang niscaya dalam realitas keseharian masyarakat, pada dasarnya moderatisme lebih cenderung sebagai konstruksi etis; alih-alih sebagai proses internalisasi doktrin-doktrin keagamaan, moderatisme lebih sebagai eksternalisasi kesalehan religiositas. Karena dengan meletakkan prinsip moderatisme sebagai konstruksi praktis, tidak jarang malah terjebak dalam sika-sikap pembiaran dan apologetik, bahkan komoditas ekonomi-politik, di hadapan pelbagai persoalan-persoalan kehidupan masyarakat; karena dengan menjadikan moderatisme sebagai proses internalisasi doktrin-doktrin keagamaan, sering kali moderatisme justru dijadikan alat untuk melegitimasi pelbagai bentuk kekerasan dan kerusakan atas nama agama.

Santri/Mahasiswa dan Pesantren dalam Pusaran Lanskap Kebudayaan Kontemporer

Sebagai realitas yang diistilahkan Gus Dur dengan *subkultur*,³ pesantren merepresentasikan suatu institusi kultural yang berkembang di jantung peradaban Indonesia. Istilah “pesantren” tersebut merupakan derivasi dari istilah “santri” yang berarti tempat tinggal para santri. Mengacu pada hasil penelitian Berg, istilah “santri” berasal dari kata *shastri* (India: orang yang mengerti isi buku suci agama

³ Istilah subkultur merujuk pada tiga karakteristik utama yang membentuk pesantren sebagai subkultur. *Pertama*, pola kepemimpinan pesantren yang mandiri, tidak terkooptasi oleh negara. *Kedua*, kitab-kitab rujukan umum yang selalu digunakan dari berbagai abad. *Ketiga*, sistem nilai yang digunakan adalah bagian dari masyarakat luas. Abdurrahman Wahid, *Pondok Pesantren Masa Depan* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 14.

Hindu) dan *shastra* (India: buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan). Sementara dalam bahasa Sansekerta mengandung makna *san*=orang baik; *tra*=suka menolong.⁴

Dalam konteks budaya digital, posisi santri/mahasiswa dan pesantren dihadapkan pada suatu perkembangan budaya baru yang tidak lagi berbasis teks (*text based*), melainkan dituntut untuk mengadaptasi suatu realitas berbasis konektivitas masyarakat yang dimediasi teknologi informasi, khususnya informasi berbasis *IoT*. Hal tersebut menjadi penanda paling genial dari aras kebudayaan kontemporer berbasis digital; semacam realitas kehidupan masyarakat ditandai oleh semakin massifnya migrasi keseharian manusia ke dalam dunia ruang ciber (*cyber-sphere*) yang turut mengubah pola interaksi antar manusia secara radikal; interaksi yang pada mulanya berkembang dalam tradisi oral (*oral culture*), kemudian tulis (*writing culture*), serta-merta berubah menjadi berbasiskan gambar algoritmik (*imagel culture*). Tak ayal, persoalan gambar beserta citra, pencitraan, dan interpretasi yang menubuh di dalamnya menjadi sangat sentral. Gambar tidak lagi dimaknai semata-mata representasi dari realitas, melainkan bisa menjadi sedemikian politis, ekonomis, bahkan ideologis.⁵

Tentunya, relasi yang terjalin antara “teknologi” dan “manusia” dalam kultur digital telah membentuk tipologi yang khas. Terkait hal ini, Neil Postman,⁶ sebagaimana dikutip Pialang, memaparkan bahwa relasi di antara keduanya membetuk tiga tipologi utama. *Pertama*, “budaya penggunaan alat” (*tool using culture*), yaitu kultur pemanfaatan alat untuk mendukung kehidupan manusia berlandaskan sistem kepercayaan atau ideologi yang saling menguatkan satu sama lainnya. *Kedua*, “teknokrasi” (*technocracy*), yaitu kultur yang memposisikan teknologi bukan bagian integral dari kebudayaan, tetapi mengendalikan manusia sebagai ‘objek’ teknologi yang menawarkan gagasan kemajuan (*progress*), kebebasan dan “dunia baru” untuk proses percepatan tempo kehidupan yang meraibkan ruang-ruang reflektif manusia. *Ketiga*, “teknopoli” (*technopoly*), yaitu kecenderungan melihat apa yang dapat dilakukan teknologi, namun tidak mampu

⁴ C.C. Berg, “Indonesia,” in *Wither Islam? A survey of Modern Movement in The Moeslem World*, ed. H.A.R Gibb (London: Routledge, 1932).

⁵ Dalam aras kebudayaan lisan dan tulisan, bahasa verbal menjadi instrumen fundamental bagi penutur realitas. Namun ketika representasi realitas beralih menuju budaya digital, gambar—terutama citra algoritmik yang dapat diprogram, dibingkai, bahkan dimanipulasi sedemikian rupa melalui proses editing, menjadi instrumen vitalnya. Maka, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa situasi kebudayaan kontemporer saat ini dapat dibayangkan sebagai budaya imajinal; sebuah dunia yang dicirikan oleh kecenderungan total untuk melihat realitas segala sesuatu dalam bentuk gambar. Tak ayal, di era teknologi digital, persoalannya tidak lagi semata-mata terletak pada paradoks dan immaterialitas gambar, melainkan fakta bahwa gambar algoritmik dapat direkayasa dan dibingkai (*framing*) sedemikian rupa melalui teknik editing. Gambar dalam pengertian tradisionalnya mengalami perubahan watak menjadi lebih interaktif, sehingga bukan lagi dapat diandaikan sebatas objek statis yang hanya bisa ditatap subjek, tetapi turut membawa subjek secara aktif masuk luruh di dalamnya. Fahmy Farid Purnama, “Alam Pikir Populis Islam dan Merebaknya Histeria Massa: Potret Pergeseran Nilai Kebenaran dan Memudarnya Ideologi,” *Tajdid* 28, no. 1 (2021): 19–20.

⁶ Neil Postman, *Technopoly: The Surrender of Culture to Technology* (New York: Vantage Books, 1993).

lagi membayangkan apa yang dapat ia rusak oleh sebab raibnya pemahaman mendasar tentang tujuan, makna, dan nilai-nilai moral.⁷

Terlepas dari tipologi dan motif migrasi kebudayaan manusia menuju medan-medan digital bisa sangat beragam, salah satu persoalan mendasar yang menyeruak dalam kultur digital, citra yang menjadi penanda munculnya era media baru (*new media*) menyulut dan mempercepat kondisi post-realitas; yaitu, sebagaimana dipaparkan Piliang, kondisi yang di dalamnya prinsip-prinsip realitas itu sendiri telah dilampaui, kemudian diambil alih oleh substitusi-substitusinya yang diciptakan secara artifisial. Realitas yang dibangun oleh pelbagai bentuk distorsi realitas, permainan bebas tanda, penyimpangan hingga kesemuan makna tersebut telah menghancurkan asumsi-asumsi konvensional tentang apa yang sering dipahami sebagai “yang nyata”.⁸

Dalam konteks religiositas manusia, kekaburan penanda batas antara “yang nyata” dan “yang semu” (artifisial) dalam dunia citra telah mendorong lahirnya situasi ketika parameter kebenaran dan otentisitas ajaran agama menjadi porak-poranda (realitas pasca-kebenaran/*post-truth*), serta-merta lebih sering dilandaskan pada prinsip-prinsip komoditas. Religiositas riuh dipertontonkan secara massif melalui percepatan-percepatan yang dimungkinkan oleh teknologi informasi, namun kehilangan basis ilmu dan proyeksi reflektifnya. Percepatan-percepatan di segala sektor kehidupan berbasis teknologi informasi tersebut telah membuka lanskap kebudayaan masyarakat kontemporer yang—meminjam analisis Piliang—setidaknya dihadapkan pada dua tekanan utama; yaitu tekanan ekonomi pasar bebas yang menuntut persaingan teknologi, sehingga mendorong situasi karnavalisme kebudayaan dan tekanan moral oleh wacana ekonomi pasar bebas yang menuntut pengingkaran kesadaran-kesadaran etis dan spiritual pada objek-objek kebudayaan, khususnya dalam fungsinya sebagai komoditas.⁹

Ketika lanskap kebudayaan digital telah menggeser persoalan keagamaan ke arah budaya pertunjukan, masyarakat dihadapkan pada suatu situasi ketika pelbagai macam hal divisualisasi dan dipertontonkan secara banal dan brutal. Realitas-realitas yang sebelumnya cenderung tertabir di balik moralitas dan etika komunal, serta-merta kehilangan batasnya. Terjadi momen-momen pelampauan pada banyak realitas yang dipertontonkan, dipampangkan, dipamerkan, hingga dipasarkan yang, pada satu sisi, mencerminkan semakin terafirmasi dan terkonfirmasinya semangat kebebasan individu manusia, namun di sisi lain, keterlibatan massa di ruang yang tanpa batas itulah, wajah kebebasan tersebut terdistorsi, bahkan terdeviasi sedemikian rupa, menjadi sedemikian artifisial yang terjebak dalam rimba raya histeria massa.¹⁰ Situasi tersebut semakin mempercepat kondisi yang sering diistilahkan dengan “matinya kepakaran” (*the death of*

⁷ Yasraf Amir Piliang, “Kreativitas Teknologi,” in *Medan Kreativitas: Memahami Dunia Gagasan* (Yogyakarta: Aurora, 2019), 305.

⁸ Yasraf Amir Piliang, “Post-Teori dan Post-Realitas,” in *Post-Realitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Post-Metafisika* (Yogyakarta: Jalasutra, 2015), 3.

⁹ Yasraf Amir Piliang, “Milenium Ketiga dan Realitas Baru Kebudayaan,” in *Sebuah Dunia yang Dilipat* (Bandung: Mizan, 1998), 326.

¹⁰ Purnama, “Alam Pikir Populis Islam dan Merebaknya Histeria Massa: Potret Pergeseran Nilai Kebenaran dan Memudarnya Ideologi.”

expertise). Wacana keagamaan yang sebelumnya dilandaskan pada prinsip-prinsip ideal-moral keagamaan, khususnya moderasi pola pikir dan gerakan yang berlandaskan nilai-nilai *rahmat li al-‘ālamīn*, serta-merta dipaksa untuk masuk dalam medan-medan histeria massa.

Di hadapan budaya kerumunan, tidak jarang religiositas masyarakat dipertontonkan dalam wajahnya yang marah, kemudian tampil dalam bentuk ujaran kebencian, *hoax*, hingga *cyber-bullying*. Sementara itu, pesantren dengan segala macam modalitasnya, cenderung masih gamang untuk melibatkan diri di hadapan realitas digital. Padahal, di hadapan aras kebudayaan teknologis semacam itulah, pesantren dituntut untuk mampu senantiasa terlibat mewarnai dinamika manusia kontemporer, terlebih dengan modal kultural, sosial, hingga intelektual yang sangat beragam dan sangat kaya.

Pengarusutamaan Islam Ramah, Menegasikan Islam Marah

Mengacu pada penelitian Purnama, dalam lanskap kebudayaan teknologi persoalannya tidak lagi semata-mata terletak pada immaterialitas gambar, melainkan fakta bahwa gambar algoritmik dapat direkayasa dan dibingkai (*framing*) sedemikian rupa melalui teknik editing. Gambar dalam pengertian tradisionalnya mengalami perubahan watak menjadi lebih interaktif, sehingga bukan lagi dapat diandaikan sebatas objek statis yang hanya bisa ditatap subjek, tetapi turut membawa subjek secara aktif masuk luruh di dalamnya.¹¹

Prinsip konektivitas dan keterbukaan di ruang digital yang diniscayakan peralihan medan-medan kebudayaan manusia telah menciptakan suatu realitas yang memberikan kesempatan yang sama, bahkan setara, bagi setiap subjek untuk terlibat secara aktif. Dalam konteks wacana keagamaan, sejauh subjek memiliki akses terhadap *smartphone* berbasis *IoT*, informasi keagamaan apapun yang ada dalam genggamannya subjek, dapat menyebarkannya secara mudah dan massif, tanpa memperdulikan persoalan validitas dan faktualitas informatifnya terlebih dahulu. Jeda untuk melakukan tindakan reflektif subjek terhadap konten informasi yang diterimanya secara bertubi-tubi serta-merta raib. Budaya instan, perebutan wacana di ruang ciber, hingga dunia pasca-kebenaran menjadi isu-isu yang turut berkontestasi secara virtual, bahkan mendorong munculnya patologi-patologi sosial dalam bentuk egologisme dan narsisme religius.

Keterbukaan dan kesetaraan untuk terlibat secara aktif sebagaimana terilustrasikan di atas mendorong setiap informasi tentang agama dan pemahaman keagamaan dikontestasikan, bahkan dikomodifikasi dan dikapitalisasi untuk kepentingan yang bias segmentatif. Tak heran, hal yang mendeterminasi sekaligus sangat menentukan kebenaran wacana keagamaan hanyalah citra yang di dalamnya terilustrasikan kehendak subjek untuk menguasai, mendominasi, bahkan mengontrol religiositas sehari-hari di dunia dengan, seringnya, memanipulasi dan membingkai citra dunia melalui teknik editing. Dunia citra menjadi cara subjek mengatur, mengontrol, bahkan menguasai realitasnya. Segala sesuatu menjadi sepenuhnya diidentifikasi melalui gambar, sehingga kehilangan sentuhan esensial

¹¹ Ibid.

dengan realitas aktual-objektifnya. Dalam istilah Baudrillard, keterputusan antara realitas dengan representasinya dinamakan dengan kondisi *hyperreal*; yakni kondisi ketika representasi atau gambaran sebuah objek tidak lagi memiliki asal-usul atau merujuk pada realitas objektifnya.¹²

Tentunya, paradigma instan dalam memenuhi kebutuhannya atas informasi keagamaan telah membentuk karakter masyarakat muslim yang berusaha mendapatkan informasi segala sesuatu tanpa melalui sebuah proses reflektif dan ilmiah secara bertanggungjawab. Padahal, meminjam ungkapan Ibn Sirrin, sebagaimana tertera dalam pendahuluan Kitab Sahih Muslim, *diriwayatkan Ibn Sirrin, berkata: Sesungguhnya ilmu ini (ilmu hadits) adalah ilmu—yang berkaitan dengan persoalan—agama, maka cermatilah dari siapa kalian mendapatkan pengetahuan agama kalian.*¹³ Persoalan-persoalan klasik di seputar terorisme, sektarianisme, chauvinisme, dan pola pikir-pola pikir maupun gerakan sejenis mulai dikontestasikan, setelah sebelumnya hanya sebatas patologi keagamaan dalam skala kecil dan terbatas, tertabir di balik rimba raya mayoritas. Kondisi ini turut berdampak pula pada cara masyarakat muslim yang terpapar informasi tersebut memproyeksikan religiositasnya secara praktis. Ujaran kebencian, *hoax*, runtuhnya fondasi *ukhuwwah basyariyyah, waṭaniyyah*, hingga *Islāmiyyah*, serta patologi-patologi destruktif lainnya menjadi bagian dari keseharian masyarakat muslim.

Raibnya aspek reflektif dalam religiositas masyarakat muslim, kemudian hanyut dalam budaya kerumunan dan histeria masa. Untuk melakukan perubahan dalam lanskap kebudayaan digital semacam itu, tentu dibutuhkan suatu pertarungan dan keberanian untuk terlibat di ruang virtual dari kalangan pesantren, mengoptimalkan fungsinya sebagai perawat kelestarian nilai ideal-moral keagamaan, lembaga pendidikan kultural, maupun pelopor transformasi sosial-kemasyarakatan, khususnya keilmuan berbasis wacana keagamaan yang bisa dipertanggungjawabkan secara reflektif dan ilmiah. Mengapa pesantren dan santri menjadi sedemikian sentral untuk mengembalikan pijakan wacana keagamaan Islam pada fondasi ideal-moral berbasiskan moderasi pola pikir dan gerakan, serta berlandaskan nilai-nilai *rahmat li al-‘ālamīn*?

Terdapat banyak alasan untuk melibatkan santri dan pesantren dalam medan-medan dakwah digital, baik alasan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Sebagian dari modal kultural, sosial, hingga intelektual terletak pada jumlah pesantren dan santri dengan bidang keilmuan dan kepakaran yang sangat beragam, juga masih kuat dalam merawat ideal-moralnya. Hal tersebut diperkuat oleh sebaran pesantren di berbagai wilayah di Indonesia serta diaspora santri di dunia yang turut menjadikannya sedemikian strategis dalam lanskap kebudayaan digital.¹⁴

¹² Jean Baudrillard, "Simulacra and Simulacrum," in *Selected Writings*, ed. Mark Poster (Stanford: Stanford University Press, 2002), 166.

¹³ Abu Al-Husain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyadh: Dar Thayyibah, 2006), 8.

¹⁴ Untuk data persebaran pesantren di Indonesia, bisa di lihat pada:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/10/01/persebaran-pondok-pesantren-di-34-provinsi> diakses pada tanggal 27 Januari 2022 pukul 18:55

Meskipun digitalisasi santri/mahasiswa dan pesantren dihadapkan pada tantangan efek daya rusak teknologi terhadap tradisi yang selama ini dirawat dan dipertahankan, namun peluangnya, ideal-moral yang menjadi fondasi religiositas santri akan turut terlibat dalam upaya merestorasi patologi-patologi sosial-keagamaan yang beberapa dekade ini terlampaui riuh merecoki watak religiositas masyarakat muslim Indonesia di ruang publik. Pada titik inilah, pengarusutamaan Islam ramah yang dikawal tradisi santri/mahasiswa dan pesantren dalam upaya penegasian Islam marah menjadi sangat signifikan. Maka, di hadapan realitas teknologis, problem infrastruktur digital, aksestabilitas, ekonomis, hingga problem legal-moral harus sesegera mungkin dilampaui dan dituntaskan santri dan pesantren; yakni dengan mulai melakukan upaya-upaya digitalisasi santri/mahasiswa dan pesantren.

Di hadapan kultur digital, upaya-upaya digitalisasi santri dan pesantren, serta pelampauan persoalan tadi bukan lagi ditanggapi secara apologetik, seperti menganalisis teknologi melalui prinsip *sadd ad-darāi'* (prinsip preventif), melainkan prinsip *fath ad-darāi'* (prinsip persuasif);¹⁵ yakni melalui pembukaan akses santri/mahasiswa secara terbuka terhadap dunia digital berbasis *Big Data* dan *IoT*, sekaligus tetap membersamainya melalui pembiasaan nilai ideal-moral dan tradisi keilmuan yang akan merawat pemahaman mendasar tentang tujuan, makna, dan nilai-nilai moral keagamaan di ruang virtual. Sehingga, mengandaikan cita-cita yang dibayangkan sebagai generasi *people-centric super-smart society* 5.0 di Indonesia, bukan mustahil muncul dari kalangan santri/mahasiswa pesantren.

Kesimpulan

Realitas teknologis, dengan segala macam peluang dan tantangannya, menjadi fakta lanskap kebudayaan kontemporer. Di hadapan kultur berbasis informasi (*information society*) yang menggejala dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim, santri/mahasiswa dan pesantren dituntut untuk mengadaptasi suatu realitas berbasis konektivitas masyarakat yang dimediasi teknologi informasi, khususnya informasi berbasis *IoT*. Santri dan pesantren, dengan segala modal kultural, sosial, hingga intelektual yang sangat kaya, pelibatannya dalam merawat ideal-moral Islam berbasiskan moderasi pola pikir dan gerakan, serta berlandaskan nilai-nilai *rahmah li al-a'ālamīn* menjadi penting dan strategis. Terlepas dari berbagai efek negatif yang diniscayakan kultur digital, upaya-upaya digitalisasi santri dan pesantren, serta pelampauan persoalan-persoalan di seputar infrastruktur digital, aksestabilitas, ekonomis, hingga problem legal-moral, merupakan sebuah keniscayaan untuk mewujudkan cita-cita keagamaan Islam sebagai *rahmat li al-'ālamīn*.

Daftar Pustaka

Al-Razi, Fakhrudin. *Tafsīr al-Kabīr: Mafātiḥ al-Ghaib*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.
Auda, Jasser. *Maqāṣid asy-Syari'ah: Dalīl lī al-Mubtadi*. Beirut: Maktabah At-Tauzi' fi Al-'Alam Al-'Arabi, 2011.

¹⁵ Terkait penelitian ini, bisa di lihat pada: Jasser Auda, *Maqāṣid asy-Syari'ah: Dalīl lī al-Mubtadi* (Beirut: Maktabah At-Tauzi' fi Al-'Alam Al-'Arabi, 2011).

- Baudrillard, Jean. "Simulacra and Simulacrum." In *Selected Writings*, diedit oleh Mark Poster. Stanford: Stanford University Press, 2002.
- Berg, C.C. "Indonesia." In *Wither Islam? A survey of Modern Movement in The Moeslem World*, diedit oleh H.A.R Gibb. London: Routledge, 1932.
- Hitachi-UTokyo Laboratory. *Society 5.0*. Tokyo: Springer, 2018.
- Muslim, Abu Al-Husain. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Dar Thayyibah, 2006.
- Neil Postman. *Technopoly: The Surrender of Culture to Technology*. New York: Vantage Books, 1993.
- Purnama, Fahmy Farid. "Alam Pikir Populis Islam dan Merebaknya Histeria Massa: Potret Pergeseran Nilai Kebenaran dan Memudarnya Ideologi." *Tajdid* 28, no. 1 (2021).
- Wahid, Abdurrahman. *Pondok Pesantren Masa Depan*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Yasraf Amir Piliang. "Kreativitas Teknologi." In *Medan Kreativitas: Memahami Dunia Gagasan*. Yogyakarta: Aurora, 2019.
- . "Milenium Ketiga dan Realitas Baru Kebudayaan." In *Sebuah Dunia yang Dilipat*. Bandung: Mizan, 1998.
- . "Post-Teori dan Post-Realitas." In *Post-Realitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Post-Metafisika*. Yogyakarta: Jalasutra, 2015.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/10/01/persebaran-pondok-pesantren-di-34-provinsi>